

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih  
Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur  
(The Effect Of Local Revenues, Balancing Fund, Surplus of Financing Budgeting  
And Area Against District/City Government's Capital Expenditure In East Java  
Province)**

Rizky An Nizya Nora, Septarina Prita DS, Ririn Irmadariyani.  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rnoraaa@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2011. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F, serta Uji t. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat penting bagi pemerintah daerah dan semakin luas suatu wilayah maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin besar.

**Kata kunci:** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah.

**Abstract**

*This research aims to determine the influences of Local revenue (PAD), the Balancing Fund, Surplus of Financing Budget (SILPA) and Area Againsts of the Capital Expenditure on district / city governments in the province of East Java. This research used secondary data obtained from the Inspector General of Financial Balance Board in 2014. Methods of data analysis using descriptive statistics, Classical Assumption Test and Hypothesis Test consisted of Regression Methods, coefficient of determination, F test and t test . The results showed that Surplus of Financing Budget no effect significantly toward Capital Expenditure. Meanwhile the PAD, the Balancing Fund and Area Againsts significant effect on Capital Expenditure. This suggests that the role of local revenues and equalization funds are very important for local governments and the wider region, the Capital Expenditure in the area becomes larger.*

**Keyword:** Capital Expenditure, Local Revenue, Balancing Fund, Surplus of Financing Budgeting and Area Againsts.

**Pendahuluan**

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Sumber – sumber penerimaan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam

melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan adanya peningkatan fasilitas yang dapat mempengaruhi peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD (Kadhafi, 2013).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Nuarsia 2013).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto, 2012 dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal adalah penambahan variable independen yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki lokasi terluas dipulau Jawa dan memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Sebagai daerah dengan penduduk yang banyak tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tinggi dalam mensejahterakan masyarakatnya. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemandirian sebesar 66,65%, kemandirian tersebut dicapai melalui kemandirian dibidang ekonomi melalui kemitraan dagang dalam negeri untuk memperkuat ekonomi. Jatim memiliki 26 perwakilan dagang antar provinsi dan sector UMKM menjadi prioritas Jatim dalam memperkuat sektor ekonomi. UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB (Bapeda Jatim, 2015)

## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersebut diperoleh langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 berupa dari laporan realisasi APBD pemerintah provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi <http://depdagri.go.id>

### Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur tahun 2014, dimana Provinsi Jawa timur memiliki 38 pemerintahan daerah ang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Sampel ang dapat diteliti berjumlah 20 kabupaten dan 3 kota sesuai dengan kriteria ang sudah ditentukan.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2013: 146)

Dengan menggunakan data dokumenter, penulis mengambil data secara langsung dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Data yang digunakan berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menggunakan data Realisasi Anggaran tahun 2014 yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 (LHP-BPK).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinieritas), dan pengujian hipotesis yang terdiri dari Metode regresi linier berganda, uji F, uji t serta koefisien determinasi

### Hasil Penelitian

#### Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dimana provinsi Jawa Timur memiliki 38 pemerintahan daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Selanjutnya dari 38 kabupaten/kota yang dapat diamati berjumlah 30 kabupaten dan 3 kota yang sudah ditentukan dengan kriteria.

**Statistik Deskriptif**

Tabel 1. Descriptive Statistic Variabel yang Diteliti

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	24	1.01E11	1.12E12	2.923E11	2.26545E11
DP	24	4.39E11	1.76E12	1.107E12	3.44114E11
SiLPA	24	1.07E11	7.15E11	2.972E11	1.54715E11
LWIL	24	16.47	5.782.40	1.425.6739	1.184.83159
Valid N (listwise)	24				

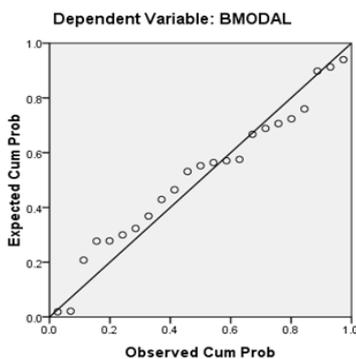
Sumber: Olah Data SPSS, tahun 2015.

PAD memperoleh nilai minimum Rp. 101.000.000.000,00, maksimum Rp. 1.120.000.000.000,00, mean Rp. 292.300.000.000,00, standar deviasi Rp. 226.545.000.000,00. Dana perimbangan memperoleh nilai minimum Rp. 439.000.000.000,00, maksimum Rp. 1.760.000.000.000,00, mean Rp. 1.107.000.000.000,00, standar deviasi Rp. 344.114.000.000,00. SiLPA memperoleh nilai minimum Rp. 107.000.000.000,00, maksimum Rp. 715.000.000.000,00, mean Rp. 297.200.000.000,00, standar deviasi Rp. 154.715.000.000,00. Luas wilayah memperoleh nilai minimum 16,47, maksimum 5.782,40, mean 1.425,8, standar deviasi 1.184,8.

**Uji Normalitas**

Metode P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Pada grafik P-plot diatas bahwa titik – titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak karena data yang digunakan berdistribusi normal dan menyebar di sekitar garis serta mengikuti garis diagonal.

**Metode Kolmogorov-Sminov Test**

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,605
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,858

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,858 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai residual yang digunakan dalam penelitian adalah normal.

**Uji Multikolinieritas**

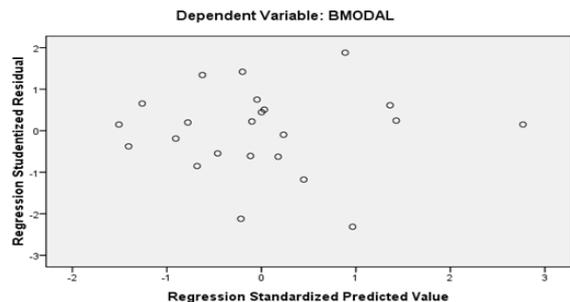
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinierity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constanta)		
PAD	0,508	1,969
DAPER	0,356	2,811
SiLPA	0,422	2,369
LUASWIL	0,557	1,794

Dari tabel diatas diperoleh bahwa nilai Tolerance dari masing – masing variabel, yaitu PAD sebesar 0,508, Dana Perimbangan sebesar 0,356, SiLPA sebesar 0,422 dan Luas Wilayah sebesar 0,557 yang lebih besar dari 0,10. Nilai VIF dari masing – masing variabel yaitu PAD sebesar 1,969, Dana Perimbangan sebesar 2,811, SiLPA sebesar 2,369, dan Luas Wilayah sebesar 1,794 yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**

Scatterplot



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena titik menyebar secara tidak teratur atau tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka nol.

### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 <sup>a</sup>	0,847	0,813	6,08432E10

Tabel diatas dapat dilihat bahwa R square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,847 (84,7%) yang berarti pengaruh PAD, Dana perimbangan, SiLPA dan Luas Wilayah dapat menerangkan variabel terikat (tingkat materialitas). Sisanya sebesar 0,153 (15,3%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

### Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah masing-masing variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variable terikat (dependent variable). Secara umum, ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan uji T dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
X1	0,000	Berpengaruh
X2	0,008	Berpengaruh
X3	0,283	Tidak Berpengaruh
X\$	0,003	Berpengaruh

### Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	24.839	0,000

Dari hasil Uji F, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 (Sig. < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah adalah model yang fit (layak).

### Analisis Regresi Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka model regresi layak sebagai alat untuk mendeteksi hubungan antar variable independen yang diajukan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) dan Luas Wilayah (X4) dengan variable dependen yaitu Belanja Modal (Y). rekapitulasi hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien regresi	t-stat.	Sig.
(Constanta)	2,819	0,616	0,546
X <sub>1</sub>	0,443	5,515	0,000
X <sub>2</sub>	0,188	2,976	0,008
X <sub>3</sub>	0,143	1,107	0,283
X <sub>4</sub>	4,761	3,439	0,003

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan hasil analisis regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,819 + 0,443 X_1 + 0,188 X_2 + 0,143 X_3 + 4,761 X_4$$

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) dan Purnama (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah semaksimal mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian dan perawatan infrastruktur. Dengan adanya peningkatan dan perawatan infrastruktur pada akhirnya nanti dapat memberikan dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah.

Dari penerimaan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan

pemerintahan, termasuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur lain. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,008 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Artinya Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian dalam penelitian Mutiara (2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Timur masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan suatu provinsi maka semakin besar pula belanja modalnya. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Melihat adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal ini, maka pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upaya penggalian sumber pendanaan asli daerah agar alokasi belanja modal bisa lebih maksimal dengan menggunkan pendapatan asli daerah (Kadafi, 2013)

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,283 lebih besar dari  $\alpha$  0,05. Artinya SiLPA tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riyanto (2012). Alokasi sisa lebih pembiayaan anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum selesai, namun dalam praktiknya ada daerah yang mengalokasikan sebagian atau seluruh sisa SiLPA tersebut untuk belanja habis pakai,

yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan sisa SiLPA kepada belanja sarana dan prasarana.

### **Pengaruh Luas Wilayah Anggaran terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Luas Wilayah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Artinya Luas Wilayah memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014. Ini berarti semakin besar Luas Wilayah maka semakin besar Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusnandar dan Siswanto (2012) bahwa secara parsial Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Memiliki infrastruktur yang baik merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, dengan infrastruktur yang maksimal pelaksanaan tugas pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

### **Kesimpulan dan Keterbatasan**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap belanja modal. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat penting bagi pemerintah daerah dan semakin luas suatu wilayah maka Belanja Modal pada daerah tersebut menjadi semakin besar.

#### **Keterbatasan**

Peneliti hanya menggunakan data pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dari faktor keuangan.. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu provinsi pada penelitian selanjutnya, agar dapat membandingkan provinsi satu dengan provinsi lainnya dan hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Juli 2007. Indriantoro dan Supomo. 2013.

*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.*

Yogyakarta : BPF

Kadafhi, Muhammad Edwin. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung).* Universitas Widyatama: Bandung

Kusnandar, Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.* Jakarta. Universitas Indonesia

Mutiara, Maimunah. 2006. *Flaypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*". Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Nuarisa, Sheila A. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Universitas Negeri Semarang

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah

Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

[http://keuangaerah.kemendagri.go.id/artikr/detail/24-dana-perimbangan-sumber-pendapatan-daerah-terbesar\\_02\\_Agustus\\_2015](http://keuangaerah.kemendagri.go.id/artikr/detail/24-dana-perimbangan-sumber-pendapatan-daerah-terbesar_02_Agustus_2015)

[http://kemendagri.go.id/media/filemanager/2015/03/24/3/5/35\\_jatim.pdf.1](http://kemendagri.go.id/media/filemanager/2015/03/24/3/5/35_jatim.pdf.1)  
4 Desember 2015

